BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Sistem Politik Islam Jepang di Indonesia

Ketertarikan Jepang terhadap Islam dimulai pada tahun 1930-an, sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian Jepang mengadakan beberapa kegiatan yang berbasis Islam demi mendukung kebijakan *Nanshin* (Perluasan ke arah Selatan).[1] karena, penduduk di wilayah selatan mayoritas beragama Islam. Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942, mereka mendarat di Jawa. Setelah mengalahkan Belanda, maka wilayah Hindia-Belanda dikuasai oleh Jepang. Sebagai penjajah, Jepang lebih kejam daripada Belanda.

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu menghapuskan pengaruh Barat dikalangan rakyat Indonesia dan memobilisasikan rakyat demi kemenangan Jepang. Untuk itu, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris, diganti dengan bahasa Jepang, Mereka juga memperkenalkan kalender Jepang, patung-patung Eropa diruntuhkan, penggantian nama jalan, dan propaganda lewat saluran radio.[2] Jepang juga merampas semua harta rakyat untuk kepentingan perang dan mewajibkan penyerahan beras, sehingga rakyat mati kelaparan, pakaian rakyat pun dari goni. Jepang membentuk “Romusha” sebagai pengganti kerja rodi, mereka juga mengerahkan *Kempetei* (Polisi Rahasia) yang akan menangkap rakyat jika tidak sesuai dengan kebijakan Jepang.[3]

Kedatangan Jepang ke Indonesia juga mempunyai tujuan lain yaitu me-Nippon-kan Indonesia. Jepang ingin menghilangkan kebangsaan Indonesia menjadi Nippon, dengan cara sebagai berikut:

---

[1] Saiful Umam,dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar baru, 2005), hlm. 401.
[2] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) hlm 300.
[3] Musyifah sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 35.

1. Membersihkan kebudayaan Barat, Bahasa Jepang dijadikan bahasa resmi. Sehingga, setiap penerbitan koran disediakan kolom pelajaran bahasa Jepang, buku pelajaran juga memakai bahasa Jepang, Madrasah yang bahasa pengantarnya bahasa Arab ditutup, dan adanya larangan untuk mengajarkan bahasa dan huruf Arab.
2. Mengubah sistem pendidikan, Jepang ingin membuat kurikulum untuk semua sekolah. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan Jepang ke arah yang dikehendaki, dengan cara mengajarkan bahasa Indonesia pada kelas 1 dan 2, dan pada kelas 3 diajarkan bahasa Jepang. Mereka juga melakukan *seikerei* (membungkukkan badan menghadap matahari terbit).
3. Membentuk barisan pemuda, Jepang berusaha melatih pemuda dan santri untuk menggunakan senjata bambu runcing, yang kemudian muncul PETA (Pembela Tanah Air) pada Oktober 1943, PELOPOR yang diresmikan pada Juli 1944, dll. Ada juga organisasi semi militer seperti *Seinendan*, *Keibodan,* dan pembantu militer *Hei-ho* pada awal 1945 untuk membantu militer bidang logistik. Untuk santri dibentuk Barisan Hisbullah yang dipimpin Zaenal Arifin, dll.
4. Memobilisasi pemimpin Islam, Jepang mendoktrin ulama dengan latihan-latihan dalam bentuk penataran. Dalam penataran tersebut, ulama juga diperintahkan untuk ber*seikerei,* dan menghilangkan ide-ide Pan-Islamisme, diganti dengan Pan-Asia dengan Jepang sebagai saudara tua atau pemimpinnya. Mereka juga menjelaskan bahwa *hakkoichiu* (persaudaraan Asia) mempunyai persamaan dengan cita-cita Islam.
5. Membentuk organisasi baru, Jepang membutuhkan organisasi muslim yang menyeluruh, dan juga dengan organisasi muslim masyarakat indonesia lebih bersimpati karena pada masa belanda mendapat larangan.

2.2. Organisasi Islam Bentukan Jepang

Organisasi Islam yang dibentuk Jepang untuk mendapatkan simpati dari kalangan Muslim di Indonesia antara lain:

1. *Shumubu* (Departemen agama buatan Jepang) tujuan Jepang membentuk departemen ini adalah untuk menundukkan dan mengawasi ulama. Pada

departemen ini juga dibebankan tugas penyelenggaraan latihan-latihan kiai dan menjadi kurator bagi MIAI. Departemen ini dibentuk pada Maret 1942 oleh Kolonel Horie dan Muhammad Abdul Muniam Inada.[4] Pada 1 Oktober 1943 Hoesein Djajadiningrat menjadi ketua *Shumubu*. Pada 1 Agustus 1944 kepemimpinannya digantikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, tetapi hanya sebagai simbol saja, tugas tersebut dilimpahkan kepada puteranya KH. Wahid Hasyim.

2. MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*), Lembaga MIAI dibentuk kembali oleh Jepang pada 5 september 1942, lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (*Masyumi*) pada akhir 1943. MIAI adalah Badan Federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937. Dzulfiqar Ramazan merupakan pencetus ormas ini sehingga menarik hati dikalangan modernes seperti Yusuf Andika dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari *Sarekat Islam*.

   Tujuan MIAI adalah untuk menggabungkan seluruh organisasi Islam untuk bekerjasama, mendamikan apabila timbul pertikaian diantara golongan umat Islam Indonesia baik yang telah bergabung didalam MIAI, mupun yang belum, merapatkan hubungan diantara umat Islam Indonesia dengan umat Islam negara lain.

3. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (*Masyumi*) dibentuk pada 24 Oktober 1943, tujuannya untuk menggantikan MIAI yang tidak disukai Jepang karena tidak bisa dikendalikan. Masyumi adalah gabungan dari semua organisasi Muslim, diantaranya yaitu, NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). Masyumi diketuai oleh KH. Hasyim Asy'ari dan wakilnya KH. Wahab Hasbullah.[5]

2.3. Dampak Politik Islam Jepang di Indonesia

Kebijakan politik Islam Jepang di Indonesia sebagai sarana untuk mendapatkan hati masyarakat indonesia sekaligus untuk membantu jepang

---

[4] Saiful Umam,dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar baru, 2005), hlm 402.

[5] Musyifah sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 36-41.

menimbulkan dampak *positif* dan *negatif*. Dampak *positif* antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada para ulama untuk mengalami pendidikan politik dengan menjadi pemimpin suatu organisasi besar yang menyeluruh dan didukung oleh berbagai macam aliran.
2. Mempersatukan sistem pendidikan.
3. Memberika latihan dan keterampilan kepada para pemuda serta mempersiapkan diri menjadi kader-kader bangsa.
4. Mempersatukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
5. Membentuk Masyumi dan Hisbullah, yang merupakan salah satu cikal bakal TNI.
6. Mendirikan sekolah tinggi Islam, dll.[6]

Sedangkan dampak *negatif* dari politik Islam Jepang di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia pada ssat itu mengalami kekacauan ekonomi, rakyat mengalami kemiskinan dan kelaparan yang sangat parah.
2. Rakyat diperintahkan untuk kerja paksa "*Romusha*" yang menggantikan kerja rodi.
3. Adanya teror dari polisi militer Jepang.
4. Banyaknya pemukulan dan pemerkosaan.
5. Pembatasan pers, semuanya diawasi oleh Jepang, dll.[7]

---

[6] Ibid, hlm 45.

[7] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern,* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2011). hlm 320.

BAB III

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Ketertarikan Jepang terhadap Islam sudah ada sejak tahun 1930-an, hal ini dilakukan untuk mendukung gerakan *Nanshin* (Perluasan wilayah ke arah selatan) karena mayoritas penduduk di wilayah selatan beragama Islam, termasuk Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia karena ingin me-nippon-kan Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantunya dalam perang. Jadi, dibentuklah kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah Jepang menjalankan rencananya. Maka di tetapkanlah kebijakan politik Islam agar mendapat simpati masyarakat yang kebanyakan Muslim, Kebijakan tersebut nyatanya juga menimbulkan dampak positif untuk Indonesia kedepannya.

1.2. Saran

Makalah yang berjudul Politik Islam Jepang ini memang jauh dari kata sempurna, kami sebagai pemakalah telah berusaha mencari referensi dan buku sebagai sumber makalah ini, maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang kami buat karena minimnya referensi maupun ilmu yang kami miliki.